



**KOMUNIKASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DALAM KONTEKS
KETERBATASAN GEOGRAFIS DAN DIGITAL: STUDI KASUS DESA
BONTO SOMBA DI KABUPATEN MAROS**

Muliati¹, Ashariana², Ibrahim³, Asy'hary⁴, Nurkadarwati⁵
Universitas Pejuang Republik Indonesia^{1,2,3,4,5}

email : muliatinangke@gmail.com, ashariana@upri.ac.id, rahimyukkas5@gmail.com,
andiasyhary001@gmail.com, nurkadarw@gmail.com

Diterima: 31/3/2026; Direvisi: 6/4/2026; Diterbitkan: 13/4/2026

ABSTRAK

Pembangunan desa sering terhambat oleh isolasi geografis yang memutus aliran informasi kebijakan ke masyarakat terpencil. Fokus masalah penelitian ini adalah menganalisis praktik komunikasi kebijakan pembangunan di Desa Bonto Somba, Kabupaten Maros, yang menghadapi keterbatasan akses fisik dan digital secara signifikan. Langkah penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif studi kasus interpretatif dengan melibatkan aparatur desa serta warga sebagai informan kunci. Tahapan penting mencakup wawancara mendalam dan observasi partisipatif guna menangkap realitas interaksi sosial nyata dalam mendistribusikan informasi pembangunan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak berjalan secara formal sistematis, melainkan bersifat hibrida melalui aktor lokal dan tradisi lisan yang kuat. Aparatur desa berperan krusial sebagai penerjemah kebijakan yang menyaring informasi sesuai kebutuhan warga, sementara masyarakat mengandalkan jejaring sosial tatap muka yang intim. Meskipun upaya digitalisasi dilakukan, pemanfaatannya masih terbatas pada fungsi administratif pemerintahan desa akibat kendala infrastruktur jaringan yang belum memadai di wilayah pegunungan. Data kualitatif menegaskan bahwa informasi pembangunan sering diterima secara parsial dan bergantung pada figur otoritas lokal semata. Simpulan utama penelitian ini adalah efektivitas komunikasi kebijakan di wilayah terpencil sangat ditentukan oleh kesesuaian antara pesan pembangunan dengan konteks geografis serta budaya komunikasi lokal, bukan sekadar ketersediaan infrastruktur teknologi informasi semata bagi masyarakat desa tersebut secara menyeluruh optimal.

Kata Kunci : *Komunikasi Kebijakan, Pembangunan Desa, Isolasi Geografis*

ABSTRACT

Village development is often hampered by geographic isolation, which disrupts the flow of policy information to remote communities. The focus of this research is to analyze development policy communication practices in Bonto Somba Village, Maros Regency, which faces significant limitations in physical and digital access. The research was conducted using a qualitative, interpretive case study approach, involving village officials and residents as key informants. Key stages included in-depth interviews and participant observation to capture the reality of real-life social interactions in distributing development information. The research findings indicate that policy communication does not operate in a formal, systematic manner, but rather in a hybrid manner, through local actors and strong oral traditions. Village officials play a crucial role as policy translators, filtering information according to residents' needs, while residents rely on intimate, face-to-face social networks. Despite digitalization efforts, its use



remains limited to the administrative functions of village government due to inadequate network infrastructure in mountainous areas. Qualitative data confirms that development information is often received fragmentarily and relies solely on local authority figures. The main conclusion of this study is that the effectiveness of policy communication in remote areas is largely determined by the alignment of development messages with the geographic context and local communication culture, not simply the availability of optimal information technology infrastructure for the village community as a whole.

Keywords: *Policy Communication, Village Development, Geographic Isolation*

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah perdesaan di Indonesia telah memasuki sebuah babak baru yang sangat signifikan semenjak diundangkannya regulasi nomor 6 tahun 2014 mengenai desa. Kebijakan ini memberikan pengakuan penuh terhadap entitas desa sebagai institusi pemerintahan terkecil yang memiliki kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam, alokasi anggaran, serta seluruh tahapan proses pembangunan secara mandiri. Dalam kerangka hukum yang progresif ini, posisi desa secara ideal ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan lagi sekadar menjadi objek pasif dari berbagai program yang diturunkan oleh pemerintah pusat. Implementasi peraturan ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat luas terhadap berbagai fasilitas publik yang memadai, meningkatkan kualitas layanan dasar, serta membuka ruang partisipasi warga yang lebih luas dalam merencanakan masa depan mereka. Kedaulatan desa menjadi kunci utama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang menetap di wilayah pinggiran. Dengan adanya otonomi fiskal dan manajerial, desa kini memiliki fleksibilitas untuk menentukan prioritas pembangunan yang paling relevan dengan karakteristik lokal masing-masing (Aryanti & Andini, 2021; Azizi et al., 2023; Ciptawaty, 2023; Pratama et al., 2025). Pergeseran paradigma ini menuntut kesiapan aparatur desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat demi mencapai kemandirian wilayah yang berkelanjutan secara ekonomi maupun sosial dalam jangka panjang.

Namun, pada tataran praktis di lapangan, capaian otonomi desa menunjukkan variasi yang sangat kontras di berbagai wilayah nusantara. Desa-desa yang secara geografis berada di kawasan sulit dijangkau sering kali menghadapi tantangan struktural yang bersifat masif dan tidak sepenuhnya dapat terselesaikan hanya melalui mekanisme transfer dana desa semata. Keterbatasan kapasitas institusi lokal, hambatan aksesibilitas wilayah yang ekstrem, serta lemahnya aliran informasi mengenai kebijakan strategis sangat memengaruhi efektivitas pembangunan serta kualitas pelayanan publik di tingkat paling bawah. Realitas ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan ideal yang dirancang di tingkat pusat dengan pengalaman hidup masyarakat di daerah terpencil. Isolasi spasial sering kali memperlemah konektivitas sosial dan memperlebar jarak antara kebijakan publik dengan kebutuhan riil yang mendesak di tengah masyarakat. Tanpa adanya dukungan infrastruktur penghubung yang memadai, kemandirian desa yang dicita-citakan sering kali terhambat oleh kendala fisik dan administratif yang kompleks. Kondisi ini menuntut perhatian khusus mengenai bagaimana skema pembangunan dapat diadaptasi agar lebih inklusif bagi wilayah yang memiliki kendala topografi berat, sehingga keadilan akses informasi dan layanan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga negara tanpa kecuali (Firdaus & Lawati, 2020; Hamilaturroyya & Adibah, 2025; Hanifah et al., 2024; Mashis et al., 2023; Natalia & Supardal, 2025).

Kondisi geografis yang menantang tersebut nampak nyata di Desa Bonto Somba,



Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, yang terletak di kawasan dataran tinggi Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini berada pada ketinggian sekitar 500 hingga 800 meter di atas permukaan laut dengan karakteristik perbukitan *karst* serta medan yang sangat curam. Topografi yang ekstrem semacam ini membentuk isolasi spasial yang berdampak langsung pada terbatasnya mobilitas penduduk, sulitnya akses terhadap pelayanan publik, hingga terhambatnya distribusi informasi mengenai arah pembangunan daerah. Dalam perspektif komunikasi pemerintahan, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi program semata, melainkan juga sangat bergantung pada proses penyampaian, pemaknaan, serta interaksi yang intensif antara pemerintah dan warga desa. Komunikasi berfungsi sebagai medium krusial yang menghubungkan rencana besar pembangunan dengan realitas sosial yang dinamis di tingkat akar rumput. Sayangnya, partisipasi masyarakat sering kali menjadi sangat terbatas ketika proses komunikasi tersebut hanya didominasi oleh segelintir kelompok tertentu dan tidak membuka ruang diskusi yang setara bagi seluruh warga. Hambatan fisik yang ada secara tidak langsung menciptakan sekat informasi yang menghalangi keterlibatan bermakna masyarakat dalam menentukan arah kebijakan desa mereka sendiri (Dewi, 2024; Ghassani et al., 2022; Huda & Swarizona, 2023; Natalia & Supardal, 2025; Ro'fah et al., 2022).

Pemerintah Kabupaten Maros melalui dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah periode 2025 hingga 2045 sebenarnya telah menetapkan visi mengenai pemerataan pembangunan dengan fokus utama pada percepatan infrastruktur di daerah tertinggal. Akan tetapi, dinamika yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang cukup lebar antara arah kebijakan makro tersebut dengan pengalaman hidup harian masyarakat di wilayah pelosok. Sebagai contoh, di Dusun Cindakko yang merupakan bagian dari Desa Bonto Somba, keterbatasan akses jalan yang layak menyebabkan warga yang sedang sakit atau meninggal dunia harus dievakuasi secara manual melalui medan terjal sejauh beberapa kilometer. Fenomena yang memprihatinkan ini merepresentasikan sebuah situasi di mana kebutuhan mendesak masyarakat belum sepenuhnya terartikulasikan dan terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan strategis di tingkat kabupaten. Kondisi semacam ini berkaitan erat dengan lemahnya mekanisme komunikasi vertikal maupun horizontal yang seharusnya menghubungkan aspirasi masyarakat desa dengan pihak otoritas pemerintah daerah. Ketimpangan informasi dan aksesibilitas mengakibatkan warga di daerah pegunungan seolah tertinggal dari arus kemajuan yang direncanakan oleh pemerintah, sehingga diperlukan sebuah evaluasi mendalam mengenai cara penyampaian informasi kebijakan agar lebih tepat sasaran dan solutif bagi warga terpencil.

Penelitian ini hadir dengan menawarkan sebuah nilai baru melalui analisis mendalam mengenai bagaimana komunikasi kebijakan pembangunan berlangsung di tengah keterbatasan akses fisik dan digital. Fokus utama diletakkan pada praktik penyediaan serta distribusi sumber informasi kebijakan bagi aparatur desa dan masyarakat luas dalam situasi infrastruktur komunikasi yang sangat minim. Digitalisasi di wilayah pegunungan seperti Desa Bonto Somba tidak dipahami sekadar sebagai adopsi teknologi informasi, melainkan sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan sumber informasi yang akurat bagi aparatur dalam melayani warga. Riset ini berupaya menelaah peran sistem informasi desa serta media komunikasi berbasis teknologi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat selama periode tahun 2025 dan masa mendatang. Inovasi kajian ini terletak pada pemetaan pola komunikasi di wilayah *blank spot* atau titik buta sinyal, di mana teknologi informasi sering kali hanya menjadi pelengkap administratif daripada sumber utama informasi. Dengan memahami cara aparatur desa menyaring dan mendistribusikan informasi kebijakan



dalam keterbatasan teknologi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika komunikasi lokal. Hasil kajian ini diproyeksikan menjadi referensi strategis dalam memperpendek jarak antara kebijakan pemerintah dan realitas hidup warga di wilayah terisolasi secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus interpretatif untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika komunikasi kebijakan pembangunan di wilayah yang terisolasi secara geografis. Lokasi penelitian ditetapkan secara spesifik di Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, yang secara topografis berada di kawasan pegunungan karst dengan ketinggian mencapai delapan ratus meter di atas permukaan laut. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik unik desa yang menghadapi hambatan akses fisik yang ekstrem serta keterbatasan infrastruktur teknologi informasi atau titik buta sinyal digital. Melalui paradigma konstruktivis, penelitian ini berupaya membedah bagaimana kebijakan pembangunan yang dirancang secara formal di tingkat pusat dimaknai dan dikonstruksikan kembali oleh para aktor di tingkat lokal. Fokus utama diletakkan pada cara aparat desa dan masyarakat menjembatani jarak komunikasi di tengah kondisi medan yang sulit. Dengan desain studi kasus yang holistik, metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas interaksi sosial dan praktik komunikasi hibrida yang muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap keterpencilan wilayah dan ketiadaan jaringan komunikasi modern yang stabil.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk mendapatkan perspektif yang kaya dari para pelaku kepentingan di desa tersebut. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposif yang dikombinasikan dengan metode bola salju untuk menjangkau individu yang memiliki pengalaman langsung terhadap hambatan komunikasi pembangunan. Sebanyak lima orang informan dilibatkan, mencakup Kepala Desa Bonto Somba sebagai pemegang otoritas administratif serta warga dari Dusun Bonto-Bonto dan Dusun Cindakko yang mewakili suara masyarakat di wilayah terpencil. Wawancara mendalam diarahkan untuk menggali narasi subjektif mengenai cara mereka menerima, menyaring, dan menyebarkan informasi kebijakan dalam situasi tanpa sinyal internet. Sementara itu, observasi partisipatif dilaksanakan dengan mengamati langsung pola interaksi harian antara perangkat desa dan warga di berbagai ruang sosial, seperti pertemuan informal atau obrolan di jalan setapak pegunungan. Teknik ini sangat krusial untuk menangkap praktik komunikasi lisan dan peran aktor lokal sebagai penerjemah kebijakan yang sering kali tidak terdokumentasi dalam laporan resmi pemerintahan, namun menjadi urat nadi utama distribusi informasi pembangunan di wilayah tersebut.

Analisis data dilaksanakan secara iteratif dan reflektif melalui tahapan pengodean tematik yang komprehensif guna mengidentifikasi pola-pola utama dalam komunikasi kebijakan desa. Proses analisis dimulai dengan kondensasi data dari hasil transkrip wawancara dan catatan lapangan, yang kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi tema-tema besar yang muncul secara alamiah dari realitas sosial di lapangan. Peneliti memfokuskan analisis pada aspek pemaknaan digitalisasi, efektivitas komunikasi tatap muka, serta peran strategis tokoh lokal dalam menjembatani kesenjangan informasi akibat kendala geografis. Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan temuan, dilakukan teknik triangulasi sumber dan teknik dengan memverifikasi hasil wawancara terhadap temuan observasi serta dokumen perencanaan pembangunan desa yang tersedia. Pengujian makna dilakukan secara berulang untuk



memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan suara informan dan konteks sosial Desa Bonto Somba yang spesifik. Seluruh rangkaian proses analisis ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah narasi ilmiah yang utuh mengenai bagaimana sistem komunikasi hibrida bekerja di wilayah tertinggal, sehingga memberikan kontribusi teoretis mengenai adaptasi kebijakan digital dalam ruang fisik yang masih terisolasi dan penuh tantangan administratif secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Letak Geografis dan Tantangan Distribusi Informasi

Desa Bonto Somba merupakan sebuah wilayah pegunungan yang memiliki karakteristik geografis sangat menantang bagi proses distribusi informasi pembangunan serta pelayanan publik sehari-hari bagi seluruh masyarakat setempat. Kondisi alam yang berbukit serta akses jalan yang masih terbatas menyebabkan penyampaian pesan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah seringkali mengalami hambatan fisik yang cukup signifikan secara berkelanjutan. Informasi resmi tidak dapat hadir secara seragam atau serentak ke seluruh penjuru dusun karena kendala infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung mobilitas komunikasi yang cepat. Akibatnya, kebijakan tidak dipahami sebagai sebuah dokumen administratif yang statis, melainkan sebagai serangkaian pengetahuan praktis yang harus diadaptasikan dengan realitas kehidupan warga di lereng gunung. Keterpencilan geografis ini memaksa sistem komunikasi pemerintahan desa untuk bergerak di luar jalur formal demi memastikan bahwa setiap warga tetap mendapatkan hak informasi yang mendasar. Realitas ini menunjukkan bahwa letak wilayah sangat menentukan efektivitas setiap kebijakan yang datang dari luar menuju masyarakat desa secara utuh.

Hambatan fisik tersebut menciptakan pola komunikasi yang unik di mana informasi harus melewati berbagai tahapan filter sosial sebelum akhirnya sampai ke telinga warga di pelosok dusun terjauh. Masyarakat tidak bisa mengandalkan metode konvensional seperti papan pengumuman pusat atau surat edaran resmi yang seringkali terlambat sampai karena sulitnya medan tempuh kendaraan bermotor. Kondisi ini menuntut adanya kreativitas dari para pemangku kepentingan di tingkat lokal untuk mengembangkan strategi adaptasi yang lebih fleksibel terhadap tantangan alam yang ada. Informasi kebijakan yang bersifat mendesak biasanya akan disampaikan melalui kurir lisan atau utusan khusus yang mampu menjangkau wilayah dengan kondisi geografis yang paling ekstrem sekalipun. Strategi ini memperlihatkan bahwa hambatan alam bukanlah penghalang mutlak, melainkan pendorong bagi lahirnya mekanisme komunikasi yang lebih personal dan berbasis pada kearifan lokal. Dengan demikian, penyampaian informasi di desa ini adalah sebuah perjuangan fisik yang melibatkan mobilisasi manusia secara aktif di tengah keterbatasan sarana transportasi yang ada saat ini bagi warga.

2. Aparatur Desa sebagai Penerjemah dan Penyaring Kebijakan

Aparatur pemerintahan desa di wilayah pegunungan ini memegang peranan yang sangat sentral sebagai penerjemah sekaligus penyaring utama setiap pesan kebijakan yang diterima dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Karena tidak semua dokumen hukum atau regulasi formal mudah dipahami oleh masyarakat awam, para perangkat desa harus melakukan proses simplifikasi bahasa agar informasi tersebut menjadi lebih kontekstual. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengantar surat, tetapi juga sebagai negosiator makna yang menyesuaikan instruksi pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata warga di lapangan. Proses

penyaringan ini bersifat selektif di mana aparaturnya akan memprioritaskan informasi yang dianggap paling mendasar dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan ekonomi serta sosial masyarakat. Tanpa peran aktif dari tokoh-tokoh lokal ini, kebijakan negara hanya akan menjadi tumpukan kertas yang asing dan tidak memiliki daya guna bagi pembangunan di tingkat dusun. Peran mereka sebagai jembatan komunikasi sangat krusial dalam menjaga stabilitas serta kelancaran setiap program pemerintah demi kemajuan ekonomi warga desa sejahtera.

Efektivitas komunikasi kebijakan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh warga terhadap sosok aparaturnya yang membawakan informasi tersebut kepada mereka secara langsung. Dalam konteks sosial yang erat, cara penyampaian informasi seringkali lebih penting daripada isi pesan itu sendiri sehingga pendekatan personal menjadi kunci keberhasilan sosialisasi. Aparatur desa harus mampu memilih waktu dan tempat yang tepat untuk berdialog dengan warga, baik melalui forum resmi maupun pertemuan santai di teras rumah. Mereka seringkali harus melakukan perjalanan jauh dari satu rumah ke rumah lainnya demi memastikan bahwa pemahaman mengenai bantuan atau program pembangunan sudah merata. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga agar inti kebijakan tidak berubah saat diterjemahkan ke dalam bahasa lokal yang lebih sederhana. Oleh karena itu, integritas dan kemampuan komunikasi lisan para perangkat desa menjadi aset utama dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah segala keterbatasan fasilitas yang ada saat ini. Kemampuan adaptasi mereka menentukan sejauh mana partisipasi warga dalam pembangunan desa.



Gambar 1. Aparatur Desa sebagai Penerjemah dan Penyaring Kebijakan

3. Jejaring Sosial Lokal dan Komunikasi Lisan Masyarakat

Dalam keseharian hidup masyarakat Desa Bonto Somba, jejaring sosial lokal dan forum pertemuan lisan menjadi sumber informasi kebijakan yang jauh lebih dominan dibandingkan media massa. Obrolan di sela-sela aktivitas pertanian atau perkumpulan warga setelah ibadah seringkali menjadi arena di mana informasi mengenai bantuan sosial serta proyek pembangunan desa didiskusikan secara mendalam. Warga lebih mempercayai kabar yang didengar langsung dari kerabat atau tetangga yang dianggap memiliki akses lebih dekat dengan kantor desa atau pusat kekuasaan. Hal ini menciptakan sebuah ekosistem informasi yang bersifat sirkular di mana berita menyebar dengan cepat melalui mulut ke mulut di sepanjang jalan dusun. Meskipun informasi tersebut terkadang mengalami distorsi ringan, kekuatan ikatan sosial memastikan bahwa pesan inti mengenai kebijakan tetap tersampaikan kepada mereka yang membutuhkan. Praktik ini menunjukkan bahwa kekuatan komunikasi tradisional tetap relevan dan menjadi tulang punggung bagi sistem penyebaran pengetahuan di tengah wilayah yang terisolasi dari jangkauan teknologi modern bagi seluruh warga desa gunung itu.

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat



Pola komunikasi yang mengandalkan pertemuan tatap muka ini juga mencerminkan karakter budaya masyarakat desa yang lebih menghargai kejujuran dan kehangatan dalam setiap interaksi sosial. Bagi mereka, informasi kebijakan bukan sekadar instruksi yang harus dipatuhi, melainkan sebuah bentuk perhatian pemerintah yang harus dirasakan melalui kehadiran fisik para pemimpin lokal. Pertemuan di dusun atau rembuk warga menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik langsung terhadap setiap rencana kebijakan yang akan diterapkan. Di sini, negosiasi makna terjadi secara alami di mana warga dapat mengajukan keberatan atau usulan tambahan yang sesuai dengan kondisi lapangan mereka masing-masing. Komunikasi lisan ini berfungsi sebagai alat pengikat komitmen antara pemerintah desa dan rakyatnya dalam menjalankan agenda pembangunan secara bersama-sama. Keberhasilan suatu program desa sangat ditentukan oleh seberapa baik proses dialog lisan ini dikelola untuk meminimalkan potensi kesalahpahaman informasi. Inilah alasan mengapa kearifan lokal dalam berkomunikasi tetap menjadi sumber kekuatan utama bagi tata kelola desa gunung yang mandiri.

4. Realitas Digitalisasi dan Fenomena Keterbatasan Sinyal

Digitalisasi informasi kebijakan di wilayah pegunungan Desa Bonto Somba menghadapi tantangan besar berupa ketersediaan sinyal internet yang sangat tidak stabil dan cenderung hilang secara tiba-tiba. Fenomena “kalau ada sinyal” menjadi istilah yang sangat akrab bagi aparat desa saat mereka mencoba mengakses sistem pelaporan daring atau mencari informasi terbaru. Teknologi digital belum bisa diposisikan sebagai sumber utama informasi karena cakupan jaringannya yang tidak merata di seluruh wilayah dusun yang letaknya terpencar-pencar. Sebagian besar perangkat desa hanya menggunakan telepon genggam sebagai sarana koordinasi internal melalui aplikasi pesan singkat, sementara masyarakat umum masih jarang menggunakannya untuk urusan birokrasi. Ketidakpastian jaringan ini menciptakan batas yang jelas antara harapan dari kebijakan pemerintah digital pusat dan realitas infrastruktur yang ada di lapangan pegunungan. Digitalisasi tidak hadir sebagai solusi instan yang menggantikan sistem lama, melainkan sebagai tantangan tambahan yang menuntut kesabaran ekstra dalam proses pelayanan publik bagi seluruh warga desa yang tetap teguh menanti hadirnya pembangunan fisik itu.

Meskipun menghadapi kendala teknis yang berat, proses digitalisasi di desa ini tetap berjalan melalui pola komunikasi yang bersifat hibrida dan penuh strategi adaptasi. Informasi kebijakan yang diterima secara digital oleh aparat desa kemudian akan diturunkan kembali kepada masyarakat melalui jalur komunikasi lisan yang bersifat konvensional dan tatap muka. Perangkat desa seringkali harus mencari titik-titik tertentu di ketinggian bukit hanya untuk mendapatkan sinyal agar dapat mengunduh dokumen penting dari kantor kecamatan. Setelah data tersebut diperoleh, mereka akan segera melakukan sosialisasi secara langsung kepada warga untuk menjembatani kesenjangan digital yang masih terjadi di lingkungan pedesaan tersebut. Pola pelapisan komunikasi ini menunjukkan bahwa teknologi digital dan tradisi lisan dapat saling melengkapi demi menjaga kelancaran roda pemerintahan desa di masa depan. Upaya digitalisasi tetap dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa kehadiran fisik manusia tetap tidak tergantikan dalam konteks sosial masyarakat pegunungan. Digitalisasi di desa ini adalah tentang semangat belajar di tengah tantangan pembangunan yang ada.

Pembahasan

Kondisi geografis Desa Bonto Somba yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan menjadi faktor utama yang menghambat kelancaran distribusi informasi pembangunan serta pelayanan publik secara menyeluruh. Tantangan fisik berupa akses jalan yang terbatas



memaksa setiap pesan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah mengalami penyesuaian sebelum sampai ke tangan masyarakat di pelosok dusun. Informasi resmi tidak lagi dipandang sebagai sekadar dokumen administratif yang bersifat statis, melainkan telah bertransformasi menjadi serangkaian pengetahuan praktis yang harus diadaptasikan dengan realitas kehidupan warga di lereng gunung. Keterpencilan wilayah ini menciptakan sebuah mekanisme komunikasi di luar jalur formal demi menjamin hak informasi dasar bagi setiap penduduk desa. Pola penyampaian pesan sering kali melewati tahapan penyaringan sosial yang cukup panjang karena sulitnya medan tempuh bagi kendaraan bermotor dalam menjangkau wilayah terjauh. Strategi adaptasi yang fleksibel terhadap tantangan alam akhirnya melahirkan sistem komunikasi yang lebih personal dan berbasis pada kearifan lokal masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa letak geografis bukan sekadar batasan ruang, melainkan penentu efektivitas kebijakan yang datang dari luar menuju masyarakat desa. Mobilisasi manusia secara aktif menjadi tulang punggung utama dalam mengatasi keterbatasan sarana transportasi yang masih belum memadai di wilayah pegunungan tersebut bagi warga pedesaan yang menanti kemajuan infrastruktur nyata (Irmansyah et al., 2021; Kumalawati et al., 2024; Novianti et al., 2023; Utami & Arsi, 2022).

Aparatur pemerintahan desa memegang peranan yang sangat sentral sebagai penerjemah sekaligus penyaring utama setiap pesan kebijakan yang diterima dari tingkat kecamatan maupun kabupaten. Mengingat dokumen hukum atau regulasi formal sering kali menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh masyarakat awam, perangkat desa melakukan proses simplifikasi agar informasi tersebut menjadi lebih kontekstual bagi kehidupan sehari-hari penduduk. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengantar surat dinas, melainkan bertindak sebagai negosiator makna yang menyesuaikan instruksi pemerintah dengan kebutuhan nyata warga di lapangan secara langsung. Proses penyaringan ini dilakukan secara selektif untuk memprioritaskan informasi yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan ekonomi serta sosial masyarakat desa yang beragam. Tanpa peran aktif dari tokoh lokal ini, setiap kebijakan negara hanya akan menjadi tumpukan berkas yang asing dan tidak memiliki daya guna bagi pembangunan tingkat dusun. Keberhasilan sosialisasi program sangat bergantung pada tingkat kepercayaan warga terhadap sosok aparatur yang membawakan informasi tersebut melalui pendekatan personal yang hangat dan jujur. Aparatur desa sering kali harus menempuh perjalanan jauh dari satu rumah ke rumah lainnya guna memastikan pemahaman mengenai bantuan pembangunan sudah merata di seluruh penjuru wilayah terpencil tersebut. Integritas serta kemampuan komunikasi lisan para perangkat desa menjadi aset utama dalam menjalankan roda pemerintahan (Agustino et al., 2023; Murniati & Hartono, 2021; Ningrum et al., 2021; Nomaini et al., 2021).

Dalam keseharian hidup masyarakat di wilayah terpencil ini, jejaring sosial lokal dan forum pertemuan lisan menjadi sumber informasi kebijakan yang jauh lebih dominan dibandingkan penggunaan media massa konvensional. Obrolan santai di sela aktivitas pertanian atau perkumpulan warga setelah menjalankan ibadah sering kali menjadi arena utama bagi diskusi mendalam mengenai bantuan sosial serta program desa. Warga cenderung lebih mempercayai kabar yang didengar langsung dari kerabat atau tetangga dekat yang dianggap memiliki akses lebih dekat terhadap pusat kekuasaan kantor desa. Hal ini menciptakan sebuah ekosistem informasi yang bersifat sirkular di mana berita menyebar dengan sangat cepat melalui mulut ke mulut di sepanjang jalan dusun yang berkelok. Meskipun terkadang terjadi distorsi ringan dalam penyampaian pesan, kekuatan ikatan sosial memastikan bahwa inti dari kebijakan tetap tersampaikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan informasi tersebut. Praktik



komunikasi tradisional ini tetap relevan dan menjadi kekuatan utama bagi sistem penyebaran pengetahuan di tengah wilayah yang masih terisolasi dari jangkauan teknologi modern. Karakter budaya masyarakat yang menghargai kejujuran dan kehangatan dalam interaksi sosial menjadikan informasi kebijakan sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat yang harus dirasakan secara fisik dan nyata oleh warga. Pertemuan di tingkat dusun berfungsi sebagai sarana krusial bagi warga untuk memberikan umpan balik langsung secara transparan (Ashariana et al., 2026; Natalia & Supardal, 2025; Siregar & Halking, 2025).

Digitalisasi informasi kebijakan di wilayah pegunungan menghadapi tantangan besar berupa ketersediaan sinyal internet yang tidak stabil dan sering kali hilang secara tiba-tiba di lokasi tertentu. Fenomena keterbatasan jaringan ini menciptakan istilah khas di kalangan aparatur desa yang hanya bisa mengakses sistem pelaporan *online* saat kondisi sinyal memungkinkan mereka terhubung ke pusat. Teknologi digital belum dapat diposisikan sebagai sumber utama informasi karena cakupan jaringan yang tidak merata di seluruh wilayah dusun yang letaknya terpencar di ketinggian bukit. Sebagian besar perangkat desa hanya memanfaatkan telepon genggam sebagai sarana koordinasi internal melalui aplikasi pesan singkat, sementara urusan birokrasi masyarakat umum masih bersifat konvensional. Ketidakpastian jaringan menciptakan batas yang sangat jelas antara harapan pemerintah pusat mengenai sistem digital dan realitas infrastruktur fisik yang ada di lapangan pegunungan yang sangat ekstrem. Proses digitalisasi tetap berjalan melalui pola komunikasi yang bersifat *hybrid* di mana informasi digital akan diturunkan kembali kepada masyarakat melalui jalur lisan tatap muka. Perangkat desa sering kali harus mencari titik koordinat tertentu di atas bukit hanya untuk mendapatkan sinyal agar dapat mengunduh dokumen penting dari kantor kecamatan. Upaya ini dilakukan dengan kesadaran bahwa kehadiran fisik manusia tetap tidak tergantikan dalam konteks sosial masyarakat pegunungan yang menghargai silaturahmi (Anggraini & Kustini, 2026; Liska et al., 2025; Setiawan & Suparman, 2026; Usnur et al., 2026).

Sinergi antara tradisi komunikasi lisan dan upaya digitalisasi yang terbatas memberikan gambaran mengenai kompleksitas tata kelola pemerintahan di wilayah yang memiliki karakteristik geografis sangat menantang. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi tertulis, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi para aktor lokal di lapangan. Keterbatasan infrastruktur jalan dan jaringan internet menuntut adanya strategi komunikasi yang lebih kreatif dengan mengandalkan kekuatan jejaring sosial masyarakat desa yang sudah sangat mapan sejak lama. Peran aparatur desa sebagai jembatan komunikasi menjadi faktor penentu utama dalam meminimalkan kesenjangan informasi antara pemerintah pusat dan warga di pelosok pegunungan yang terisolasi. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jangkauan pengamatan yang masih berfokus pada dinamika lisan tanpa didukung oleh ketersediaan fasilitas teknologi informasi yang memadai secara merata di tiap dusun. Diperlukan pembangunan fisik yang lebih intensif guna mendukung kelancaran distribusi informasi agar tidak hanya mengandalkan kurir lisan atau utusan khusus dalam setiap keadaan yang bersifat mendesak. Kehadiran fisik para pemimpin lokal tetap menjadi simbol kehadiran negara yang sangat dihargai oleh warga dalam setiap proses rembuk desa atau forum musyawarah mufakat. Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi masa depan harus terus diupayakan demi mewujudkan kemandirian desa yang tetap berpijak pada nilai kebersamaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan di Desa Bonto Somba





berlangsung melalui praktik yang sangat bergantung pada aktor lokal dan kondisi geografis desa. Informasi kebijakan tidak disebarkan secara merata melalui mekanisme formal, melainkan disaring dan diterjemahkan oleh aparatur desa sebelum sampai ke masyarakat. Warga pada umumnya memperoleh informasi pembangunan melalui komunikasi lisan dan jejaring sosial lokal, yang menjadikan kedekatan sosial sebagai faktor penting dalam pemahaman kebijakan desa.

Digitalisasi informasi kebijakan belum berfungsi sebagai sumber utama bagi masyarakat, terutama karena keterbatasan jaringan dan akses teknologi. Pemanfaatan teknologi digital lebih dominan pada aspek administratif pemerintahan desa dan komunikasi vertikal, sementara penyampaian informasi kepada warga tetap mengandalkan cara-cara konvensional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi di desa pegunungan belum berjalan sebagai sistem yang utuh, tetapi hadir secara terbatas dan situasional.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi kebijakan di Desa Bonto Somba berjalan secara hibrida, mengombinasikan sumber informasi digital dan non-digital sesuai dengan konteks lokal. Praktik ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan dan digitalisasi desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan aparatur desa dan masyarakat dalam menyesuaikan informasi kebijakan dengan kondisi sosial dan geografis yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., Hikmawan, M. D., & Silas, J. (2023). Village chiefs and clientelism: A reflection after 25 years of reform in Indonesia. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2), 197. <https://doi.org/10.15575/jispo.v12i2.20818>
- Anggraini, I. H., & Kustini, K. (2026). Literasi digital melalui sosialisasi penggunaan aplikasi JMO untuk monitoring saldo JHT pekerja PT. HM Sampoerna. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 216. <https://doi.org/10.51878/community.v6i1.8939>
- Aryanti, F. I., & Andini, D. P. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.25047/asersi.v1i1.2668>
- Ashariana, A., Ibrahim, I., Muliati, M., & M, R. A. (2026). Analisis kualitas pelayanan administrasi kependudukan. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(2), 807. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i2.9344>
- Azizi, A. H., Sukimin, S., & Nuswanto, A. H. (2023). Optimalisasi pengalokasian dana desa dalam menunjang pembangunan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1), 23. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.6521>
- Ciptawaty, U. (2023). Literasi keuangan digital sebagai upaya pendukung perekonomian. *BEGAWI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 125. <https://doi.org/10.23960/begawi.v1i2.26>
- Dewi, S. M. (2024). Policy communication in rural regulation formulation: Why is it difficult to be realized? Dalam *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (hlm. 79). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-285-9_10
- Firdaus, F., & Lawati, S. (2020). Keterjangkauan informasi dalam pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.48093/jiask.v2i1.14>



- Ghassani, S. A., Priyarsono, D. S., Rindayanti, W., & Seminar, A. U. (2022). Analisis pembangunan wilayah melalui program dana desa di Kabupaten Bogor: Pendekatan teori kelembagaan. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(1), 48. <https://doi.org/10.22146/mgi.75432>
- Hamilaturroyya, H., & Adibah, I. Z. (2025). Dinamika pengembangan kurikulum di era digital dalam menjawab kesenjangan konsep dan praktik. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(3), 1245. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6631>
- Hanifah, Z., Fatimah, S., & Fitriasia, A. (2024). Pemikiran filsafat postmodern dalam membangun pemerintahan yang inklusif. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(4), 588. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.4007>
- Huda, M., & Swarizona, S. (2023). Menuju satu dekade pelaksanaan Undang-Undang Desa. *Journal on Education*, 5(4), 12388. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2220>
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas kebijakan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>
- Kumalawati, A., Nifu, L. L., Udiana, I. M., & Rizal, A. H. (2024). Peran transportasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan di Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT. *Warta Penelitian Perhubungan*, 35(2), 13. <https://doi.org/10.25104/warlit.v35i2.2217>
- Liska, U., Novaria, E., Farhat, F., Suhaila, S., & Yusuf, A. (2025). Penguatan kapasitas relawan bencana melalui posko pelatihan pengetahuan kebencanaan (pas wacana p3k) di Kabupaten OKU Selatan. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1380. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6925>
- Mashis, B. M., Aksa, A. H., Muayyanah, A., & Satriya, M. K. (2023). Komunikasi digital dan perubahan sosial masyarakat pedesaan. *Mu Ashir Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 1(2), 357. <https://doi.org/10.35878/muashir.v1i2.916>
- Murniati, M., & Hartono, T. (2021). Komunikasi organisasi dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pembangunan desa Batang Batindih Kabupaten Kampar. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 3(4), 227. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v3i4.13447>
- Natalia, N., & Supardal, S. (2025). Kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera (studi kasus di desa Semantun Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat). *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 569. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5742>
- Ningrum, R., Martoyo, M., & Arifin, A. (2021). Implementasi kebijakan pendampingan desa di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. *PubliKA Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2). <https://doi.org/10.26418/publika.v10i2.2831>
- Nomaini, F., Saraswati, E., & Effendi, S. (2021). Sosialisasi manajemen penggunaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Lorok Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 4(2), 258. <https://doi.org/10.30591/japhb.v4i2.2269>
- Novianti, R., Pusnita, I., Mahdiana, Y., & Alpriansyah, A. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui inovasi transportasi online berbasis WhatsApp di Desa Galang Tinggi, Banyuasin III. *ABDIMAS ALTRUIS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2),



163. <https://doi.org/10.24071/aa.v6i2.7132>
Pratama, T., Frinaldi, A., Naldi, H., & Magriasti, L. (2025). Relevansi desentralisasi terhadap dinamika pemerintahan lokal: Kajian literatur pada pemberdayaan masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(4), 1737. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.8544>
- Ro'fah, R., Hanjarwati, A., & Suprihatiningrum, J. (2022). The long road to social inclusion: Participation of vulnerable groups in village development. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 6(2), 225. <https://doi.org/10.14421/jpm.2022.062-05>
- Setiawan, A. C., & Suparman, M. Y. (2026). Studi kualitatif: Strategi komunikasi pasangan menikah dalam mempertahankan hubungan jarak jauh. *PAEDAGOGY Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 6(1), 174. <https://doi.org/10.51878/paedagogy.v6i1.8972>
- Siregar, D. S., & Halking, H. (2025). Sistem pengawasan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan publik (Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 851. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6597>
- Usnur, U. H., Sutrisni, S., Sari, L. D., Sakinah, R., & Hanum, E. (2026). Edukasi parenting islami berbasis video home education untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak di desa. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 401. <https://doi.org/10.51878/community.v6i1.9414>
- Utami, S. M., & Arsi, A. A. (2022). Lingkungan perdesaan: Sebuah tantangan perubahan bagi masyarakat pegunungan. *Bookchapter Alam Universitas Negeri Semarang*, 1, 90. <https://doi.org/10.15294/ka.v1i1.86>